

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGEHASAN.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
INTISARI.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan terhadap Politik Hukum dan Politik Ekologi	15
B. Tinjauan Terhadap Otonomi Daerah	25
C. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	31
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	48
B. Sifat Penelitian	49
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	49
D. Jalannya Penelitian.....	55
E. Analisis Hasil	55
F. Jalan Penelitian	56
BAB IV PEMBAHASAN.....	57
A. Pertimbangan Hukum dan Politik Penghapusan Kewenangan Pemerintah Daerah terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	57
1. Pertimbangan Hukum Penghapusan Kewenangan Pemerintah Daerah	57
a. Pertimbangan Filosofis	58
b. Pertimbangan Sosiologis.....	67
c. Pertimbangan Yuridis	76

2.	Pertimbangan Politik Penghapusan Kewenangan Pemerintah Daerah	106
a.	Risalah Sidang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara	108
b.	Politik Ekologi Pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020	121
B.	Implikasi Hukum Penghapusan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	135
1.	Implikasi terhadap Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945	136
2.	Implikasi terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	152
BAB V PENUTUP		157
A.	Kesimpulan	157
B.	Saran	158
DAFTAR PUSTAKA		160